

**PEMBINGKAIAN BERITA SUARA MERDEKA**  
**(Analisis Framing dalam Penyajian Berita Konflik Pendirian Pabrik Semen di**  
**Rembang)**

Astrid Nurhasanah

---

### **1. Pendahuluan**

Lingkungan merupakan salah satu aspek terpenting yang menunjang kehidupan manusia. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, sudah sepatutnya melestarikan dan mengolah kekayaan tersebut untuk memenuhi kesejahteraan masyarakatnya. Namun, seringkali pengolahan kekayaan alam di Indonesia masih belum sesuai dengan standar ramah lingkungan. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi pada proses pengolahan kekayaan alam adalah terjadinya konflik agraria. Hal tersebut dikarenakan, tanah memiliki arti yang penting, tak hanya sebagai sumber penghidupan namun juga penentu status sosial.

Dari sekian banyak kasus konflik agraria, konflik Pegunungan Kendeng di Rembang menjadi salah satu konflik yang paling banyak menarik perhatian. Konflik antara warga lokal

Kendeng dengan PT Semen Indonesia (PT SI) terus bergulir sejak tahun 2014 hingga sekarang ini. Konflik yang bermula sejak agenda peletakan batu pertama tambang semen pada tahun 2014 ini juga menyangkut ekologi. Sebab lokasi pengerukan tambang berada di tengah-tengah kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih yang merupakan kawasan lindung geologi yang harusnya di konservasi. Selain itu, warga Kendeng mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan informasi tentang pembangunan PT SI, terlebih setelah diketahui bahwa sosialisasi hanya didapatkan kepala daerah tanpa melibatkan warga. Konflik Pegunungan Kendeng ini terus berlanjut hingga ke jalur hukum. Persepsi dan perilaku kita terhadap alam dan isu-isu lingkungan pasti dimediasikan oleh berbagai macam sumber bukan hanya dari media seperti berita, film, majalah saja tetapi juga *popular culture*, laporan, penelitian alam, debat politik,

perbincangan sehari-hari dan lain sebagainya (Cox dalam Manulong, 2012). Namun media mainstream seperti koran dan televisi memiliki agenda sendiri dalam memberitakan isu ekologi dalam medianya. Agenda tersebut seringkali disesuaikan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Dalam isu lingkungan, media massa berperan penting dan memiliki pengaruh, antara lain membentuk opini publik dan kebijakan agenda. Pengaruh tersebut merupakan efek dari framing. Hal tersebut dikarenakan suatu isu yang disajikan dengan framing tertentu akan mengakibatkan pemahaman publik yang berbeda-beda. Eriyanto (2007: 145) berpendapat bahwa framing menentukan apakah suatu peristiwa dianggap sebagai masalah sosial atau tidak yang kemudian memunculkan opini publik. Ketika peristiwa dilihat sebagai masalah sosial dan didefinisikan sebagai masalah bersama, maka perhatian publik akan berubah menjadi lebih besar.

Dari situasi tersebut, timbulah pertanyaan-pertanyaan penelitian: *Seperti apakah konstruksi realitas konflik pembangunan*

*pabrik semen di Rembang oleh Suara Merdeka? Apakah konstruksi teks berita yang dibentuk Suara Merdeka sesuai dengan realita yang terjadi?*

Atas dasar *research question* tersebut, tujuan penelitian ini: (1) Menjelaskan perangkat framing dalam pemberitaan konflik pendirian PT SI di Kendeng pada surat kabar Suara Merdeka? (2) Menjelaskan perangkat penalaran dalam pemberitaan konflik pendirian PT SI di Kendeng pada surat kabar Suara Merdeka?

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena data dalam penelitian ini bukan angka, melainkan kata-kata. Dalam hal ini, data penelitian ini adalah wacana lingkungan tentang konflik pendirian PT SI di Kendeng yang dimuat di Suara Merdeka.

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menempuh tahap-tahap berikut ini:

a. Pencarian sumber data tertulis mengenai konflik pendirian PT SI di Kendeng pada

Suara Merdeka selama kurun waktu Oktober 2016 hingga Maret 2017.

b. Menentukan secara purposif berita yang akan dianalisis, yakni berita mengenai konflik pendirian PT SI di Kendeng. Dengan demikian, didapatkan data sebanyak 8 wacana berita.

c. Setelah melalui tahap analisis framing, maka diadakan wawancara mendalam dengan pihak yang terlibat dalam teks berita tersebut, misalnya narasumber. Wawancara tersebut direkam menggunakan telepon seluler. Rekaman tersebut kemudian akan diringkas dengan membuang data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Data wawancara tersebut digunakan untuk mengetahui realitas berdasarkan versi masing-masing aktor.

### 3. Pembahasan

**Temuan.** Dalam rekonstruksi teks beritanya, Suara Merdeka memiliki ciri khas yakni berupa pelabelan dengan citra positif kepada pemerintah provinsi Jawa Tengah, khususnya Gubernur

Ganjar Pranowo. Selain pelabelan, Suara Merdeka kerap menggunakan *exemplaar* berupa perbandingan kekhawatiran publik dengan kondisi pabrik semen di daerah lain.

**Pembahasan.** Pertama, selama konflik pendirian pabrik semen, Suara Merdeka lebih banyak memberitakan seputar proses hukum yang tengah terjadi. Selain itu juga kerap diberitakan keuntungan dan kerugian pihak-pihak jika pabrik semen tetap dibangun, serta menyangkut ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan perihal kelestarian alam masih kurang dipaparkan.

Kedua, Suara Merdeka melakukan pelabelan tertentu terhadap pemerintah provinsi Jawa Tengah, khususnya Gubernur Ganjar Pranowo. Pelabelan tersebut berhubungan dengan sikap Gubernur mengenai konflik ini, sehingga menghasilkan Keputusan Gubernur.

**Tabel 1**

**TABEL HASIL ANALISIS FRAMING BERDASARKAN PERANGKAT PEMBINGKAIAN**

<b>No</b>	<b>Judul Berita</b>	<b>Metaphors</b>	<b>Catchphrases</b>	<b>Exemplaar</b>	<b>Depiction</b>	<b>Visual Images</b>
1	Semen Indonesia Gagal Beroperasi	-	Hal ini justru menjadi <i>pelajaran bagi investor</i> yang masuk Jateng agar menaati semua peraturan	Pemprov selalu manaati hukum. Saat ini, persoalan administrasi pabrik semen di Grobogan sudah beres. Tinggal menunggu pembangunan konstruksi. Sementara pabrik semen di Wonogiri ditolak karena tata ruang. Demikian juga pabrik semen di Gombang yang ditolak karena tidak layak berdasar	Ganjar dilabelkan sebagai pemimpin yang berkomitmen untuk taat hukum.	Ilustrasi sebuah pabrik disertai dengan buku dan palu hakim. Ilustrasi ini diberi judul “Jalan panjang mengadang pabrik semen” yang kemudian memuat kronologis masalah-masalah yang dihadapi saat rencana pendirian pabrik semen di Rembang

				penilaian pakar.		
2	Setop Pabrik, Tunggu Salinan	SK Gubernur sebagai objek sengketa, diumpamakan bertabrakan dengan UU No 32/-2009, Peraturan Daerah Jawa Tengah No 6/2010, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 14/2011	Serbuan Investor yang Nyaris Kandas	Di lapangan, pembangunan pabrik semen di Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, masih tetap berlanjut. Pekerja-pekerja yang mengerjakan konstruksi pabrik semen juga terlihat masih bekerja seperti biasa.	Ganjar dilabelkan sebagai pemimpin yang taat hukum melalui kutipan, “Kalau (rakyat) menang, tidak pernah ada pabrik semen,” kata Ganjar	(1) Ilustrasi: jumlah banyaknya investor yang menanamkan modal di Jawa Tengah, lokasi proyek, dan nilai investasi. (2) Poin-poin investasi yang akan dan tengah berlangsung di Jawa Tengah
3	FKR Tuntut Pabrik Semen Dilanjutkan	-	“Kami sangat mendukung pembangunan pabrik Semen Indonesia di Rembang karena ini akan menjadi	Ditambahkan Wahid adanya penolakan pembangunan pabrik semen hanya datang dari sebagian kecil	Warga yang menolak pembangunan pabrik semen dilabelkan sebagai massa yang dikoordinir oleh pihak luar	Foto besar berukuran 5 kolom x 14 cm yang menunjukkan warga desa sekitar pembangunan pabrik semen tengah membawa spanduk

			<p><i>momentum kebangkitan Rembang</i>, terutama perekonomian dan pembangunan sosial warga Rembang,” tegas koordinator aksi, Wahid</p>	<p>warga, dan dikoordinir oleh pihak luar yang mengklaim dan mengatasnamakan warga secara keseluruhan</p>		<p>berisi tuntutan mereka.</p>
4	<p>Gubernur Teken Izin Semen Rembang</p>	-	<p>Di Pati berkonflik, tapi <i>tidak sampai geger</i></p>	<p>“Akan di-<i>review</i>. Tapi setahu saya KLHS tak menentukan itu. KLHS kira-kira dan dugaannya akan mengarah pada KBAK (kawasan Bentang Alam Karst)”</p>	<p>Keputusan Gubernur semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara</p>	<p>Foto besar yang menunjukkan sejumlah aktivis lingkungan melakukan aksi tolak tambang dan pembangunan pabrik semen di Rembang di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.</p>
5	<p>Pabrik Semen Diminta</p>		<p>Manajemen juga diminta untuk terus</p>	<p>Kekhawatiran hilangnya sumber</p>	<p>Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng,</p>	<p>Foto suasana audensi antara Komisi D</p>

	Tunggu Kajian Lingkungan	-	memberikan edukasi dan penjelasan kepada masyarakat yang masih kontra agar bisa tercapai <i>kesamaan persepsi</i>	mata air ditampik dengan cara mengajak warga Rembang melihat langsung kondisi lingkungan pabrik semen di Tuban yang sudah beroperasi selama 20 tahun	Hadi Santoso mengatakan, PT Semen Indonesia sudah <i>bersikap kooperatif</i> terkait permintaan komisi.	DPRD Jateng dengan manajerial PT Semen Indonesia. Foto menunjukkan sikap manajerial yang kooperatif terkait permintaan komisi
6	Unjuk Rasa Tuntut Cabut Izin Pabrik Semen di Rembang	AMDAL yang dibuat PT SI dinyatakan <i>cacat hukum</i> oleh MA.	“Tuntutan lainnya, kami meminta penghentian <i>kriminalisasi terhadap petani Jateng</i> . Juga menyelesaikan konflik agraria yang ada di Indonesia khususnya Jateng,” kata Galih Agus	“Gugurnya Ibu Patmi dalam perjuangan untuk menyelamatkan kawasan resapan air tanah (karst) di Rembang pun tidak mengetuk hati nurani gubernur dan presiden.”	Presiden Joko Widodo tidak peduli dengan warga, terbukti tidak memerhatikan keluhan dua orang yaitu Gunarti dan Gunarto yang datang ke Istana	Sebuah foto yang menampilkan Aliansi Masyarakat Antikekerasan Terhadap Petani yang tengah berorasi. Tampak seorang wanita tengah berorasi sedangkan massa membawa berbagai macam spanduk.

			Saputro, koordinator lapangan unjuk rasa			
7	Pemprov Tolak Rekomendasi KLHS	-	KLHS <i>menyusun sendiri dan memvalidasi sendiri</i> . Pengolahan data sesuai asumsi mereka sendiri.	Dalam Perpres Nomor 32 Tahun 1990 dan PP Nomor 43 Tahun 2010 sama sekali tidak disebutkan larangan aktivitas pertambangan, sehingga larangan penambangan dalam hasil kajian Tim KLHS patut dipertanyakan	Ketua Penjaminan Mutu Tim KLHS Prof Sudharto, Kepala KSP Teten Masduki dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sulit dimintai konfirmasi terkait sikap Pemprov. Berkali-kali dihubungi, namun tidak ada tanggapan.	Sebuah ilustrasi tangan yang tengah menggenggam pabrik. Ilustrasi tersebut berjudul “Sikap Pemprov Jateng” dengan 5 rincian.
8	Mensos Dukung		Bupati Rembang menjelaskan	Industri semen berperan sebagai	Proses produksi yang dilakukan PT	Menteri Sosial memegang simbol



	Pabrik Rembang	-	daerahnya dirugikan dengan <i>pemberitaan tidak benar</i> atau dibesarkan, khususnya menyangkut semen	penunjang utama dalam percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur yang dicanangkan pemerintah. Contohnya pembangunan infrastruktur logistik seperti jalan, pelabuhan, jembatan dan bandara	SI akan ramah lingkungan	bantuan beasiswa kepada para siswa cerdas yang didanai oleh CSR PT SI. Di sebelahnya berdiri dua anak dengan pakaian daerah
--	----------------	---	---	--	--------------------------	---

**Tabel 2**

**TABEL HASIL ANALISIS FRAMING BERDASARKAN PERANGKAT PENALARAN**

No	Judul Berita	<i>Roots</i>	<i>Appeals to Principle</i>	<i>Consequences</i>
1	Semen Indonesia Gagal Beroperasi	Meski putusan MA dalam putusan PK telah membatalkan izin penambangan untuk kepentingan pabrik semen di Rembang, dia (Ganjar Pranowo) tidak khawatir investor akan lari atau takut menanamkan modal di Jateng dengan kejadian tersebut.	Masyarakat membutuhkan pemimpin yang juga peduli akan lingkungan dan tata ruang.	Gagal beroperasinya pabrik semen bukan merupakan tanggung jawab Pemprov. Meski Gubernur telah mengeluarkan SK Gubernur No 660 .1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan di Kabupaten Rembang
2	Setop Pabrik, Tunggu Salinan	Dalam amar putusan MA seperti dikutip dari laman resmi MA yaitu: Kabu; PK. Batal putusan <i>judex facti</i> (putusan PTUN), adili kembali, kabul gugatan, batal objek sengketa. Hal tersebut dapat berarti pembangunan pabrik semen	Pemimpin yang baik adalah yang menaati hukum. Gubernur Ganjar Pranowo mengaku akan mematuhi apa pun putusan Mahkamah Agung terkait pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia di	Belum dikeluarkannya salinan putusan dari panitera MA memunculkan spekulasi atas keutuhan hasil putusan. Detil putusan dapat berupa pembatalan putusan yang lama, perintah menerbitkan putusan yang baru atau penghapusan sama sekali.

		masih bisa dilanjutkan karena yang dibatalkan adalah SK Gubernur Jateng sebagai objek gugatan.	Rembang	
3	FKR Tuntut Pabrik Semen Dilanjutkan	Pembangunan pabrik semen harus tetap berlanjut karena warga wilayah ring satu yang meliputi lima desa mendukung adanya pabrik semen	“Pemerintah seharusnya lebih memihak kepada rakyat banyak, bukan membela segelintir orang yang sejatinya tidak mewakili desa sekitar pabrik semen”	Pembangunan pabrik semen diharapkan tetap dilanjutkan, karena menurut warga yang tinggal paling dekat dengan pabrik (ring satu) merasa pembangunan tersebut tidak merugikan atau mengancam, malah memberikan banyak dampak positif.
4	Gubernur Teken Izin Semen Rembang	Gubernur mengatakan, alasan pemberian izin ini adalah rekomendasi dari sidang Komisi Penilai AMDAL (KPA) tentang penilaian adendum AMDAL dan RKL-RPL pada tanggal 2 Februari. Selain itu, dalam prosesnya semua pihak telah diundang, termasuk yang	Pemimpin yang baik adalah yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya.	Keputusan Gubernur Nomor 6660.1/6 Tahun 2017 sudah melalui banyak pertimbangan dan semata-mata untuk kepentingan rakyat.

		kontra. Tapi ternyata ada pihak kontra yang tidak datang dan ada yang <i>walk out</i>		
5	Pabrik Semen Diminta Tunggu Kajian Lingkungan	Perangkat roots memberi pemahaman bahwa kekhawatiran kehilangan sumber mata air dapat dipecahkan dengan cara mengedukasi warga. Edukasi tersebut dilakukan dengan cara memberi gambaran mengenai keadaan yang akan dialami warga dan Rembang, dengan cara mengunjungi pabrik PT SI di Tuban.	“Pembangunan tidak selalu memuaskan semua orang. Ada sebagian yang masih kontra, sehingga kami ingin memastikan masyarakat yang belum menerima pabrik tidak dijauhi atau dikucikan,” imbuh Hadi.	Tidak perlu mengkhawatirkan kerusakan lingkungan dan perusahaan siap beroperasi setelah dikeluarkannya kajian lingkungan
6	Unjuk Rasa Tuntut Cabut Izin Pabrik Semen di Rembang	Sudah sepatutnya Presiden Joko Widodo sebagai pemegang kekuasaan tertinggi menggunakan kapasitasnya memanusiakan seorang orang yang telah merelakan waktu dan tenaga untuk menjaga bumi ini	Warga penolak pabrik semen berjuang semata-mata untuk keadilan dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup	Perjuangan warga Rembang dan sekitarnya yang semata-mata untuk kelestarian alam sudah sepatutnya dimanusiakan, serta tidak melakukan kriminalisasi terhadap petani di Jateng.

7	Pemprov Tolak Rekomendasi KLHS	Dalam pertemuan di Kantor Staf Presiden (KSP) pada 12 April 2017 tak ada pembahasan mengenai penghentian operasional tambang di CAT Watuputih. Selama CAT Watuputih tidak dinyatakan sebagai KBAK, maka PT SI masih diperbolehkan menambang seperti sejumlah perusahaan lainnya	Dengan ajuan moratorium pabrik semen di Jateng kepada Presiden, menunjukkan kepedulian Gubernur akan Jateng.	Karena CAT Watuputih tidak dinyatakan sebagai KBAK dan hasil KLHS tidak memiliki kekuatan hukum, Pemprov dapat menolak rekomendasi KLHS
8	Mensos Dukung Pabrik Semen Rembang	Sudah 20 tahun banyak penambangan kapur di Rembang. Dalam sehari dapat mencapai 4000 hingga 5000 ton dan hal tersebut tidak mempengaruhi sumber air, sehingga adanya pabrik semen juga tidak akan berdampak pada sumber air dan akan memberikan penguatan ekonomi di Rembang	Pejabat publik yang baik adalah yang langsung turun ke lapangan, guna melihat kejadian yang sebenarnya	Keberadaan pabrik semen di Rembang akan memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah adanya bantuan pendidikan, selain itu dalam jangka panjang juga akan memberikan penguatan SDM dan ekonomi di Rembang.

